



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DAERAH TAHUN 2024-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penerapan seluruh jenis standar pelayanan minimal urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perlu diatur dalam suatu pedoman;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kalimantan timur Tahun 2024-2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH TAHUN 2024– 2027.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.

6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II UMUM

Pasal 2

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.

Pasal 3

- (1) Penerapan SPM dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

BAB III PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, yang terdiri dari:
 - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar;

- b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
 - (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
 - (6) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

BAB IV INTEGRASI SPM

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Bappeda selaku wakil ketua tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Bappeda selaku wakil ketua tim Penerapan SPM dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

BAB V
STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis Penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi Penerapan SPM.
- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (7) Strategi dan pemenuhan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
 - a. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
 - b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
 - c. tahun dasar pelaksanaan;
 - d. pencapaian SPM;
 - e. inisiasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. instansi pelaksana.

- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan Pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku sekretaris tim Penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Sekretaris Daerah selaku ketua tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, dan upaya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah dan daerah kabupaten/kota.

- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hubungan masyarakat.
- (3) Dalam penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM melakukan analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Juli 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 27.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DAERAH DI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
2023 - 2027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan SPM Daerah) Gubernur Kalimantan Timur, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. LATAR BELAKANG.....	4
1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN.....	5
1.3. KONDISI UMUM WILAYAH	5
1.3.1. LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH	5
1.3.2. TOPOGRAFI	6
1.3.3. HIDROLOGI	7
1.3.4. DEMOGRAFI.....	7
1.3.5. KAWASAN RAWAN BENCANA.....	7
1.3.6. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI.....	8
1.4. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM.....	9
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM ..	11
2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM	11
2.2. PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	14
BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	17
3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI	17
3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM	25
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM	99
4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM	99
4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
5.1. KESIMPULAN	106
5.2. SARAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	11
Tabel 2.2 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	11
Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	12
Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	12
Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	13
Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	13
Tabel 3.1 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2023-2027.....	25
Tabel 3.2 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Kalimantan Timur 2023-2027.....	55
Tabel 3.3 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2023-2027.....	65
Tabel 3.4 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat Kalimantan Timur 2023-2027.....	75
Tabel 3.5 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur 2023-2027.....	76
Tabel 3.6 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial Kalimantan Timur 2023-2027.....	86
Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Renaksi adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah dan sebagai alat dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3. Kondisi Umum Wilayah

1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Provinsi Kalimantan Timur secara geografis terletak antara 20 37' 12.99" Lintang Utara (LU) dan -20 28' 19.31" Lintang Selatan (LS), 1130 50' 3.61-1190 14' 13.06" Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Selat Makassar;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 15.344.552 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.446.113 ha dan wilayah laut yang mencapai 2.898.439 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

1.3.2. Topografi

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi adalah wilayah pada ketinggian 100-500 m sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25 persen seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya, luas wilayah pada kemiringan diatas 40 persen (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15 persen sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai). Beberapa sungai yang ada di wilayah Kalimantan Timur adalah Sungai Berau, Sungai Kelai, Sungai Dondang, Sungai Mahakam, Sungai Belayan, Sungai Jembayan, Sungai Karang Mumus, Sungai Kaso, Sungai Kedang Pahu, Sungai Lawa, Sungai Loa Haur dan Sungai Telen.

Aktivitas geologi yang telah berlangsung di wilayah Kalimantan Timur menghasilkan berbagai jenis batuan. Jenis batuan yang terbentuk berupa sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik ditemukan berbagai kandungan mineral baik logam (mineral logam) dan non-logam (*mineral industry*) serta bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomis sebagai potensi bahan galian tambang yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Pada praktiknya keberadaan bahan galian tambang yang berlimpah, menarik orang untuk mengeksploitasi secara berlebihan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Perlu dilakukan pertambangan berkelanjutan sesuai kaidah "*Good Mining Practice*" yang berwawasan lingkungan.

1.3.3. Hidrologi

Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.

1.3.4. Demografi

Secara umum, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 3.552.191 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.941.766 jiwa pada tahun 2022.

1.3.5. Kawasan Rawan Bencana

Potensi bencana di Provinsi Kalimantan Timur yang sangat rawan terjadi yaitu banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan. Aktivitas manusia yang berpotensi meningkatkan bahaya dan risiko bencana Banjir yakni: pembudidayaan daerah dataran banjir; peruntukan tata ruang di dataran banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir; permukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak memadai; terbatasnya tindakan mitigasi banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah hulu; terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir; dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil banjir.

Pada tahun 2021, Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memiliki indeks 153,28 dan di tahun 2022 IRBI Kalimantan Timur mengalami penurunan risiko bencana menjadi 146,47, atau penurunan sebesar 6,81 poin dari tahun 2021, meskipun demikian Provinsi Kalimantan Timur masih berada dalam zona yang

memiliki risiko bencana yang tinggi. Capaian penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah keberhasilan pemerintah daerah dalam peningkatan Ketahanan Daerah

1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 40 persen dari total PDRB Kaltim. Namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Mulai tahun 2018, kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi Lapangan Usaha pertanian yang sempat turun tipis pada tahun yang sama. Namun semenjak 2020, khususnya karena masa Pandemi COVID-19, maka terlihat penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian hingga menjadi 41,29 persen dan terjadi peningkatan cukup signifikan pada Kategori Industri Pengolahan dan Kategori Pertanian. Sedangkan pada tahun 2021 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan mencapai 45,05 persen sedangkan sektor yang lain mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2022, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian kembali meningkat tajam hingga mencapai 53,24 persen akan tetapi sektor yang lain mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 2,67 persen pada tahun 2018, dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 4,04 persen serta laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 5,95 persen. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi negatif 2,90 persen. Hal ini disebabkan terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami kontraksi sebesar 0,62 persen.

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 4,48 persen dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 2,55 persen. Pertumbuhan bersumber dari peningkatan permintaan global maupun domestik serta juga turut ditopang oleh peningkatan aktivitas

masyarakat, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mencapai 5,59 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,11 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim tersebut utamanya bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan sejalan dengan tingginya pengiriman ekspor ke negara tujuan, disertai momen harga komoditas batu bara yang berada pada level tinggi. Di samping itu, berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kaltim, mobilitas masyarakat yang terus membaik, dan masa panen produk pangan dan pertanian menjadi penopang pertumbuhan.

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi Tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi lingkungan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh Tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh Tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh

setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Provinsi	Pendidikan Menengah			Pendidikan Khusus			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kalimantan Timur	177.468	177.468	100%	2.842	2.842	100%	60.000.000.000	-

Sumber: Laporan SPM Provinsi

2.2.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Provinsi	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi			Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kalimantan Timur	75	105	100%	1065	1065	100%	1.289.064.000	-

Sumber : Laporan SPM Provinsi Bidang Kesehatan pada Aplikasi e-SPM T.A 2023

2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Provinsi	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota			Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kalimantan Timur	100	100	100%	100	100	100%	43.873.487.868	15.325.903.468

Sumber : Laporan SPM Provinsi Bidang Pekerjaan Umum pada Aplikasi e-SPM T.A 2023

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Provinsi	Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi			Pendataan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Wilayah Yang Harus Dilayani	Jumlah Wilayah yang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kalimantan Timur	30	30	100%	22.579	22.579	100%	1.686.520.000	1.686.520.000

Sumber : Laporan SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Aplikasi e-SPM T.A 2023

2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Provinsi	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kalimantan Timur	1000	1000	100,00%	30.471.499.400	3.802.669.692

Sumber : Laporan SPM Provinsi Bidang Kesehatan pada Aplikasi e-SPM T.A 2023

2.2.6. Bidang Sosial

Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Provinsi	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di dalam Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di dalam Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di dalam Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di dalam Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kalimantan Timur	21	21	100,00%	253	253	100,00%	110	110	100,00%	82	82	100,00%	1518	1518	100,00%	13,510,853,868	-

Sumber: Laporan SPM Provinsi Bidang Sosial Pada Aplikasi e-SPM T.A 2023

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Provinsi Kalimantan Timur ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur melayani Pendidikan ditingkat SMA/SMK/SLB yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, sehingga untuk penerapan SPM masih terkendala dengan letak geografis seperti akses yang sulit dijangkau ke daerah ataupun sekolah-sekolah kategori 3T (Terpencil, Tertinggal dan Terluar).
2. Untuk menjalankan Program dan Kegiatan di 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur sangat diperlukan keterlibatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat banyak. Mulai dari pemerintah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, satuan pendidikan, masyarakat dan lain-lainya
3. Aplikasi perlu disempurnakan karena jika kita input data ada yang salah seluruh kolom tidak bisa tersimpan (hilang)
4. Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs), terjadi kesalahan format pada kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) di penginputan pencapaian SPM, harusnya jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah kejuruan (SMK).
5. Sub kegiatan tidak bisa ditambah pada kegiatan dan anggaran SPM.
6. Pertanggal 20 Desember 2022 belum ada update data penduduk semester 2 dari BPS untuk usia 16 - 18 Tahun.
7. Aplikasi memerlukan data penduduk per triwulan sementara BPS menyajikan data bentuk per semester.

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya peta rawan bencana.
2. Perbedaan persepsi terhadap jenis pelayanan SPM Provinsi.
3. Belum tersedianya Lokus Daerah Rawan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Belum optimalnya integrasi antar perangkat daerah pengampu penanggulangan bencana
5. Sumber daya tenaga kesehatan yang terbatas
6. Kapasitas tenaga kesehatan yang kurang memadai dalam penanggulangan KLB
7. Keterbatasan Ruang Isolasi pada Rumah Sakit Rujukan
8. Ketidaksiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan sehingga kasus baru terus meningkat
9. Formulir pengisian pada aplikasi masih tergeneralisasi sementara data yang tersedia jenis dan satuannya berbeda

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kalimantan Timur secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap Standar Pelayanan Minimal. Hal ini berimbas pada tidak sepenuhnya program dan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM dapat termuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.
2. Penerapan SPM perlu didukung oleh Pemerintah Daerah baik dari sisi kebijakan (regulasi/peraturan) dan dukungan anggaran terutama untuk koordinasi dan pelaporan (penyediaan data).
3. Hingga tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki SPAM dan SPALD Regional dikarenakan beberapa alasan teknis dan non teknis.
4. Ketersediaan data belum optimal yang dipengaruhi oleh kesulitan mendapatkan data/laporan SPM dari perangkat daerah terkait (Kabupaten/Kota dan Level Provinsi). Akibatnya terjadi keterlambatan dalam analisis data dan pelaporan tidak tepat waktu sesuai yang diharapkan

2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kalimantan Timur secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih

terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya Surat Penetapan Gubernur terhadap daerah indikasi rawan bencana;
2. Perlu adanya Surat Penetapan Gubernur terhadap lokasi rumah dan/atau perumahan yang perlu mendapat penanganan relokasi;
3. Pemenuhan terhadap SPM jenis pelayanan dasar Perbaikan Rumah Terhadap Korban Bencana sulit dipenuhi, karena area yang terjadi bencana umumnya pada 1 wilayah Kabupaten/Kota;
4. Perlu adanya kesepakatan bersama dengan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal pemberian bantuan bagi korban bencana di daerah.

2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kalimantan Timur secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan penindakan pelanggaran Perda.
3. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/ instansi terkait.

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Provinsi Kalimantan Timur berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Kalimantan Timur Belum terdapat panti sosial pemerintah untuk menampung Penyandang Disabilitas Terlantar.
2. Provinsi Kalimantan Timur Belum terdapat panti sosial pemerintah untuk menampung Gelandangan Dan Pengemis Terlantar.
3. Kurangnya aparatur pekerja sosial di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2020–2022 belum disahkan (Peraturan Gubernur masih dalam bentuk rancangan/draft).

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

3.1.1. SPM Bidang Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Provinsi Kalimantan Timur Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Program SPM Pendidikan Menengah	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1 Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2 Fasilitasi pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
		Tingkat penyerapan lulusan (SMK)	1 Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan	Lulusan
			2 Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik	Lembaga sertifikasi
		Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK)	1 Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja	Kegiatan
2			1 Pendataan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas)	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
	Program SPM Pendidikan Khusus	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus	tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah	
			2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
		kependidikan di satuan pendidikan khusus	yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.2. SPM Bidang Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Orang
			2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Orang

3.1.3. SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen
			2 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Liter/Detik
			3 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Liter/Detik
			4 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	SR
			5 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Dokumen
			6 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	SR
			7 Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota
			8 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Kab/Kota
			9 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Unit
			10 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
			11 Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Ha
			12 Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			2 Pemecuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Dokumen
			3 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga
			4 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Rumah Tangga
			5 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			6 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat
			7 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8 Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
			9 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit

3.1.4. SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			2 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			3 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
			4 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
			5 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
			6 Pendataan Tingkat Kerusakan Akibat Bencana Provinsi	Dokumen
			7 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
			8 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Orang
			2 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Orang
			3 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Dokumen
			4 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Orang
			5 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Orang
			6 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang
			7 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			3 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			4 Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Rumah Tangga
			5 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			6 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah
			7 Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Rumah Tangga
			8 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			9 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
			2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan
			3 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Rumah Tangga
			4 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Rumah Tangga
			5 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen

3.1.5. SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen
			4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen
			7 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit
			8 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen
			9 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
			2 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
			3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
			2 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditepat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Dokumen

3.1.6. SPM Bidang Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1 Penyediaan Permakanan	Orang
			2 Penyediaan Sandang	Orang
			3 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang
			4 Penyediaan Alat Bantu	Orang
			5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Orang
			6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang
			7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Orang
			8 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Orang
			9 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Pengasuhan	Orang
			2 Penyediaan Makanan	Orang
			3 Penyediaan Sandang	Orang
			4 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang
			5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Orang
			6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang
			7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Orang
			8 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			9 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			12 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Orang
			13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1 Penyediaan Permakanan	Orang
			2 Penyediaan Sandang	Orang
			3 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang
			4 Penyediaan Alat Bantu	Orang
			5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Orang
			6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang
			7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Orang
			8 Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk	Orang
			9 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			12 Pemulasaraan	Orang
			13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Dokumen
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Penyediaan Permakanan	Orang
			2 Penyediaan Sandang	Orang
			3 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang
			4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Orang
			5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang
			6 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Orang
			7 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Orang
			9	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			10	Pemulangan ke Daerah Asal	Orang
			11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Dokumen
2	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.1 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2023-2027

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendidikan Menengah			184.180	170.006			846.469.986.407		APBD
	SMA							178.128.414.897		APBD
a	Angka Partisipasi Kasar	%	95,09			100	99,71	28.838.947.336		APBD
b	Angka Partisipasi Sekolah	%	81,43			100	81,43	28.838.947.336		APBD
c	Angka Partisipasi Murni	%	83,3			100	70,49	28.838.947.336		APBD
d	Kemampuan Literasi	Nilai	67,16			66,92	70,91	20.774.017.723		APBD
e	Kemampuan Numerasi	Nilai	54,97			54,72	56,83	20.774.017.723		APBD

f	Perbedaan Skor Literasi	Nilai	Null				3,46	3,46	20.774.017.723		APBD
g	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	Null				1,77	1,77	20.774.017.723		APBD
h	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	83,2				83,02	70,94	1.549.962.166		APBD
i	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai	86,84				86,84	63	3.099.924.333		APBD
j	Kecukupan Formasi Guru ASN	%	Null				29,05	29,05	773.123.100		APBD
k	Indeks Distribusi Guru	%	Null				0,38	0,38	773.123.100		APBD
l	Proporsi PTK Bersertifikat	%	Null				89,2	89,2	773.123.100		APBD
m	Proporsi PTK Penggerak	%	Null				0,16	0,16	773.123.100		APBD
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%	Null				63,5	63,5	773.123.100		APBD

	SMK								634.426.308.210		APBD
a	Angka Partisipasi Kasar	%	95,09				100	99,71	32.910.392.386		APBD
b	Angka Partisipasi Sekolah	%	81,43				100	81,43	32.910.392.386		APBD
c	Angka Partisipasi Murni	%	83,3				100	70,49	32.910.392.386		APBD
d	Kemampuan Literasi	Nilai	62,53				63,54	59,92	98.388.852.332		APBD
e	Kemampuan Numerasi	Nilai	52,3				52,81	46,81	98.388.852.332		APBD
f	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Nilai	92,3				91,32	92,03	39.223.893.750		APBD
g	Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	Nilai	82,5				70,9	82,5	98.388.852.332		APBD
h	Perbedaan Skor Literasi	Nilai	Null				1,88	1,88	98.388.852.332		APBD

i	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	Null			0,65	0,65	98.388.852.332		APBD
j	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	79,92			79,92	68,82	330.680.072		APBD
k	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai	84,5			84,5	61,135	330.680.072		APBD
l	Kecukupan Formasi Guru ASN	%	Null			33,05	33,05	773.123.100		APBD
m	Indeks Distribusi Guru	%	Null			0,33	0,33	773.123.100		APBD
n	Proporsi PTK Bersertifikat	%	Null			90,05	90,05	773.123.100		APBD
o	Proporsi PTK Penggerak	%	Null			0,06	0,06	773.123.100		APBD
p	Pengalaman Pelatihan Guru	%	Null			20	20	773.123.100		APBD
										APBD

2	Pendidikan Khusus			3.192	2.727			33.915.263.300		APBD
a	Angka Partisipasi Kasar	%	80			100	85,43	2.137.031.600		APBD
b	Angka Partisipasi Sekolah	%	38,92			100	38,92	2.137.031.600		APBD
c	Angka Partisipasi Murni	%	38,92			100	85,43	2.137.031.600		APBD
d	Kemampuan Literasi	Nilai	56,23			58,44	45,83	5.909.638.250		APBD
e	Kemampuan Numerasi	Nilai	55,45			52,54	45,83	5.909.638.250		APBD
f	Perbedaan Skor Literasi	Nilai	Null			5,53	5,53	5.909.638.250		APBD
g	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	Null			5,49	5,49	5.909.638.250		APBD
h	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	76,8			76,8	70,37	0		APBD

i	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai	91,34			91,34	69,68	0		APBD
j	Kecukupan Formasi Guru ASN	%	Null			22	22	773.123.100		APBD
k	Indeks Distribusi Guru	%	Null			0,36	0,36	773.123.100		APBD
l	Proporsi PTK Bersertifikat	%	Null			90,04	90,04	773.123.100		APBD
m	Proporsi PTK Penggerak	%	Null			0,02	0,02	773.123.100		APBD
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%	Null			9,68	9,68	773.123.100		APBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran		
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19
1	Pendidikan Menengah		187.863	173.406			731.137.485.870		APBD
	SMA						349.103.487.696		APBD
a	Angka Partisipasi Kasar	%			100		93.088.870.688		APBD
b	Angka Partisipasi Sekolah	%			100		93.088.870.688		APBD
c	Angka Partisipasi Murni	%			100		93.088.870.688		APBD
d	Kemampuan Literasi	Nilai			73,27		14.689.458.190		APBD
e	Kemampuan Numerasi	Nilai			58,88		14.689.458.190		APBD
f	Perbedaan Skor Literasi	Nilai			3,48		14.689.458.190		APBD

g	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai			1,79		14.689.458.190	APBD
h	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			89,98		1.934.552.346	APBD
i	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai			92,39		3.869.104.693	APBD
j	Kecukupan Formasi Guru ASN	%			29,07		1.055.077.167	APBD
k	Indeks Distribusi Guru	%			0,40		1.055.077.167	APBD
l	Proporsi PTK Bersertifikat	%			89,22		1.055.077.167	APBD
m	Proporsi PTK Penggerak	%			0,18		1.055.077.167	APBD
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%			63,52		1.055.077.167	APBD
								APBD
	SMK						382.033.998.173	APBD

a	Angka Partisipasi Kasar	%				100		77.332.968.333		APBD
b	Angka Partisipasi Sekolah	%				100		77.332.968.333		APBD
c	Angka Partisipasi Murni	%				100		77.332.968.333		APBD
d	Kemampuan Literasi	Nilai				68,30		3.342.026.860		APBD
e	Kemampuan Numerasi	Nilai				56,04		3.342.026.860		APBD
f	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Nilai				94,00		123.551.650.642		APBD
g	Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	Nilai				79,00		3.342.026.860		APBD
h	Perbedaan Skor Literasi	Nilai				1,90		3.342.026.860		APBD
i	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai				0,67		3.342.026.860		APBD

j	Indeks Iklim Keamanan	Nilai				86,74		1.499.307.466		APBD
k	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai				90,05		2.998.614.933		APBD
l	Kecukupan Formasi Guru ASN	%				33,07		1.055.077.167		APBD
m	Indeks Distribusi Guru	%				0,35		1.055.077.167		APBD
n	Proporsi PTK Bersertifikat	%				90,07		1.055.077.167		APBD
o	Proporsi PTK Penggerak	%				0,08		1.055.077.167		APBD
p	Pengalaman Pelatihan Guru	%				20,02		1.055.077.167		APBD
										APBD
2	Pendidikan Khusus		3.256	2.782				36.043.886.631		APBD

a	Angka Partisipasi Kasar	%				100		7.035.018.266		APBD
b	Angka Partisipasi Sekolah	%				100		7.035.018.266		APBD
c	Angka Partisipasi Murni	%				100		7.035.018.266		APBD
d	Kemampuan Literasi	Nilai				65,63		1.979.566.500		APBD
e	Kemampuan Numerasi	Nilai				62,27		1.979.566.500		APBD
f	Perbedaan Skor Literasi	Nilai				5,55		1.979.566.500		APBD
g	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai				5,51		1.979.566.500		APBD
h	Indeks Iklim Keamanan	Nilai				86,91		581.726.667		APBD
i	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai				91,98		1.163.453.333		APBD

j	Kecukupan Formasi Guru ASN	%				22,02	-	1.055.077.167		APBD
k	Indeks Distribusi Guru	%				0,38	-	1.055.077.167		APBD
l	Proporsi PTK Bersertifikat	%				90,06	-	1.055.077.167		APBD
m	Proporsi PTK Penggerak	%				0,04	-	1.055.077.167		APBD
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%				9,70	-	1.055.077.167		APBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran		
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27
1	Pendidikan Menengah		191620	176874			750.239.185.778		APBD
	SMA						349.103.487.696		APBD
a	Angka Partisipasi Kasar	%			100		97.743.314.222		APBD
b	Angka Partisipasi Sekolah	%			100		97.743.314.222		APBD
c	Angka Partisipasi Murni	%			100		97.743.314.222		APBD
d	Kemampuan Literasi	Nilai			77,63		15.423.931.100		APBD
e	Kemampuan Numerasi	Nilai			61,64		15.423.931.100		APBD
f	Perbedaan Skor Literasi	Nilai			3,50		15.423.931.100		APBD

g	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai			1,81		15.423.931.100		APBD
h	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			93,37		2.031.279.963		APBD
i	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai			94,34		4.062.559.928		APBD
j	Kecukupan Formasi Guru ASN	%			29,09		1.107.831.025		APBD
k	Indeks Distribusi Guru	%			0,42		1.107.831.025		APBD
l	Proporsi PTK Bersertifikat	%			89,24		1.107.831.025		APBD
m	Proporsi PTK Penggerak	%			0,20		1.107.831.025		APBD
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%			63,54		1.107.831.025		APBD
							-		APBD
	SMK						401.135.698.082		APBD

a	Angka Partisipasi Kasar	%			100		81.199.616.750		APBD
b	Angka Partisipasi Sekolah	%			100		81.199.616.750		APBD
c	Angka Partisipasi Murni	%			100		81.199.616.750		APBD
d	Kemampuan Literasi	Nilai			72,41		3.509.128.203		APBD
e	Kemampuan Numerasi	Nilai			56,92		3.509.128.203		APBD
f	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Nilai			95,21		129.729.233.174		APBD
g	Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	Nilai			80,45		3.509.128.203		APBD
h	Perbedaan Skor Literasi	Nilai			1,92		3.509.128.203		APBD
i	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai			0,69		3.509.128.203		APBD

j	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			90,15		1.574.272.839		APBD
k	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai			92,83		3.148.545.680		APBD
l	Kecukupan Formasi Guru ASN	%			33,09		1.107.831.025		APBD
m	Indeks Distribusi Guru	%			0,37		1.107.831.025		APBD
n	Proporsi PTK Bersertifikat	%			90,09		1.107.831.025		APBD
o	Proporsi PTK Penggerak	%			0,10		1.107.831.025		APBD
p	Pengalaman Pelatihan Guru	%			20,04		1.107.831.025		APBD
									APBD
2	Pendidikan Khusus		3.321	2.837			36.043.886.631		APBD

a	Angka Partisipasi Kasar	%			100		7.386.769.179		APBD
b	Angka Partisipasi Sekolah	%			100		7.386.769.179		APBD
c	Angka Partisipasi Murni	%			100		7.386.769.179		APBD
d	Kemampuan Literasi	Nilai			68,57		2.078.544.825		APBD
e	Kemampuan Numerasi	Nilai			64,24		2.078.544.825		APBD
f	Perbedaan Skor Literasi	Nilai			5,57		2.078.544.825		APBD
g	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai			5,53		2.078.544.825		APBD
h	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			90,34		610.813.000		APBD
i	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai			94,67		1.221.626.000		APBD

j	Kecukupan Formasi Guru ASN	%			22,04	-	1.107.831.025		APBD
k	Indeks Distribusi Guru	%			0,40	-	1.107.831.025		APBD
l	Proporsi PTK Bersertifikat	%			90,08	-	1.107.831.025		APBD
m	Proporsi PTK Penggerak	%			0,06	-	1.107.831.025		APBD
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%			9,72	-	1.107.831.025		APBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran		
1	2	3	29	30	31	32	33	34	35
1	Pendidikan Menengah		195.453	180411			855.555.568.270		APBD
	SMA						434.363.085.283		APBD
a	Angka Partisipasi Kasar	%			100		349.103.487.696		APBD
b	Angka Partisipasi Sekolah	%			100		102.630.479.934		APBD
c	Angka Partisipasi Murni	%			100		102.630.479.934		APBD
d	Kemampuan Literasi	Nilai			81,99		16.195.127.654		APBD
e	Kemampuan Numerasi	Nilai			65,10		16.195.127.654		APBD
f	Perbedaan Skor Literasi	Nilai			3,52		16.195.127.654		APBD

g	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai			1,83		16.195.127.654		APBD
h	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			96,76		2.132.843.961		APBD
i	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai			95,93		4.265.687.924		APBD
j	Kecukupan Formasi Guru ASN	%			29,11		1.163.222.576		APBD
k	Indeks Distribusi Guru	%			0,44		1.163.222.576		APBD
l	Proporsi PTK Bersertifikat	%			89,26		1.163.222.576		APBD
m	Proporsi PTK Penggerak	%			0,22		1.163.222.576		APBD
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%			63,56		1.163.222.576		APBD
							-		APBD
	SMK						421.192.482.986		APBD

a	Angka Partisipasi Kasar	%			100		85.259.597.587		APBD
b	Angka Partisipasi Sekolah	%			100		85.259.597.587		APBD
c	Angka Partisipasi Murni	%			100		85.259.597.587		APBD
d	Kemampuan Literasi	Nilai			76,52		3.684.584.613		APBD
e	Kemampuan Numerasi	Nilai			57,80		3.684.584.613		APBD
f	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Nilai			96,42		136.215.694.833		APBD
g	Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	Nilai			81,90		3.684.584.613		APBD
h	Perbedaan Skor Literasi	Nilai			1,94		3.684.584.613		APBD
i	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai			0,71		3.684.584.613		APBD

j	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			93,56		1.652.986.481		APBD
k	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai			94,73		3.305.972.964		APBD
l	Kecukupan Formasi Guru ASN	%			33,11		1.163.222.576		APBD
m	Indeks Distribusi Guru	%			0,39		1.163.222.576		APBD
n	Proporsi PTK Bersertifikat	%			90,11		1.163.222.576		APBD
o	Proporsi PTK Penggerak	%			0,12		1.163.222.576		APBD
p	Pengalaman Pelatihan Guru	%			20,06		1.163.222.576		APBD
							-		APBD
2	Pendidikan Khusus		3.387	2.894					APBD

a	Angka Partisipasi Kasar	%			100		36.043.886.631		APBD
b	Angka Partisipasi Sekolah	%			100		7.756.107.638		APBD
c	Angka Partisipasi Murni	%			100		7.756.107.638		APBD
d	Kemampuan Literasi	Nilai			71,51		2.182.472.066		APBD
e	Kemampuan Numerasi	Nilai			66,26		2.182.472.066		APBD
f	Perbedaan Skor Literasi	Nilai			5,59		2.182.472.066		APBD
g	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai			5,55		2.182.472.066		APBD
h	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			93,78		641.353.650		APBD
i	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai			96		1.282.707.300		APBD

j	Kecukupan Formasi Guru ASN	%			22,06	-	1.163.222.576	APBD
k	Indeks Distribusi Guru	%			0,42	-	1.163.222.576	APBD
l	Proporsi PTK Bersertifikat	%			90,10	-	1.163.222.576	APBD
m	Proporsi PTK Penggerak	%			0,08	-	1.163.222.576	APBD
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%			9,74	-	1.163.222.576	APBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran		
1	2	3	37	38	39	40	41	42	43
1	Pendidikan Menengah		199362	184019			880.878.172.298		APBD
	SMA						438.626.065.163		APBD
a	Angka Partisipasi Kasar	%			100		349.103.487.696		APBD
b	Angka Partisipasi Sekolah	%			100		107.762.003.930		APBD
c	Angka Partisipasi Murni	%			100		107.762.003.930		APBD
d	Kemampuan Literasi	Nilai			86,35		17.004.884.037		APBD
e	Kemampuan Numerasi	Nilai			68,56		17.004.884.037		APBD
f	Perbedaan Skor Literasi	Nilai			3,54		17.004.884.037		APBD

g	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai			1,85		17.004.884.037		APBD
h	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			100		2.239.486.160		APBD
i	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai			97,52		4.478.972.320		APBD
j	Kecukupan Formasi Guru ASN	%			29,13		1.221.383.705		APBD
k	Indeks Distribusi Guru	%			0,46		1.221.383.705		APBD
l	Proporsi PTK Bersertifikat	%			89,28		1.221.383.705		APBD
m	Proporsi PTK Penggerak	%			0,24		1.221.383.705		APBD
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%			63,58		1.221.383.705		APBD
							-		APBD
	SMK						442.252.107.135		APBD

a	Angka Partisipasi Kasar	%		100		89.522.577.466		APBD
b	Angka Partisipasi Sekolah	%		100		89.522.577.466		APBD
c	Angka Partisipasi Murni	%		100		89.522.577.466		APBD
d	Kemampuan Literasi	Nilai		80,63		3.868.813.844		APBD
e	Kemampuan Numerasi	Nilai		58,68		3.868.813.844		APBD
f	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Nilai		97,63		143.026.479.574		APBD
g	Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	Nilai		83,35		3.868.813.844		APBD
h	Perbedaan Skor Literasi	Nilai		1,96		3.868.813.844		APBD
i	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai		0,73		3.868.813.844		APBD

j	Indeks Iklim Keamanan	Nilai			96,97		1.735.635.805		APBD
k	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai			96,31		3.471.271.612		APBD
l	Kecukupan Formasi Guru ASN	%			33,13		1.221.383.705		APBD
m	Indeks Distribusi Guru	%			0,41		1.221.383.705		APBD
n	Proporsi PTK Bersertifikat	%			90,13		1.221.383.705		APBD
o	Proporsi PTK Penggerak	%			0,14		1.221.383.705		APBD
p	Pengalaman Pelatihan Guru	%			20,08		1.221.383.705		APBD
							-		APBD
2	Pendidikan Khusus		3.455	2.952					APBD

a	Angka Partisipasi Kasar	%		100		36.043.886.631		APBD
b	Angka Partisipasi Sekolah	%		100		8.143.913.020		APBD
c	Angka Partisipasi Murni	%		100		8.143.913.020		APBD
d	Kemampuan Literasi	Nilai		74,45		2.291.595.670		APBD
e	Kemampuan Numerasi	Nilai		68,2		2.291.595.670		APBD
f	Perbedaan Skor Literasi	Nilai		5,61		2.291.595.670		APBD
g	Perbedaan Skor Numerasi	Nilai		5,57		2.291.595.670		APBD
h	Indeks Iklim Keamanan	Nilai		97,22		673.421.333		APBD
i	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas	Nilai		97,80		1.346.842.665		APBD

j	Kecukupan Formasi Guru ASN	%		22,08	-	1.221.383.705		APBD
k	Indeks Distribusi Guru	%		0,44	-	1.221.383.705		APBD
l	Proporsi PTK Bersertifikat	%		90,12	-	1.221.383.705		APBD
m	Proporsi PTK Penggerak	%		0,10	-	1.221.383.705		APBD
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%		9,76	-	1.221.383.705		APBD

Tabel 3.2 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Kalimantan Timur 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2022	Pencapaian SPM Tahun 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Provinsi										
1)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah		2022	105	105			169.338.500,00		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINAS KESEHATAN
1	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Orang				105	105				
2	Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)	Orang				105	105				
3	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	Orang				105	105				
4	Dokter	Orang				10	10				
5	Perawat	Orang				12	12				
6	Bidan	Orang				20	20				
7	Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	Orang				2	2				
8	Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	Orang				3	3				
9	Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	Orang				5	5				
10	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang				2	2				
2)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah		100	1065	1065			11.109.725.500,00		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINAS KESEHATAN
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	Unit				1598	1598				
2	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	Unit				488310	99000				
3	Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	Unit				1065	1065				
4	Tempat sampah biologis	Unit				10	10				
5	Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lambar KIE, Alat tulis yang diperlukan	.				1065	1065				

6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit				1065	1065				
7	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit				10	10				
8	Dokter	Orang				2044	2044				
9	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang				155	155				
10	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang				323	323				
11	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang				16	16				
12	Tenaga Laboratorium	Orang				1106	1106				
13	Tenaga penyuluhan/promosi kesehatan	Orang				301	301				
14	Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang				26	26				

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20
	Provinsi									
1)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah		105	105			721.330.000,00		DAU, DAK, CSR, LAINNYA	DINAS KESEHATAN
1	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Orang			105	105				
2	Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)	Orang			105	105				
3	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	Orang			105	105				
4	Dokter	Orang			10	10				
5	Perawat	Orang			12	12				
6	Bidan	Orang			20	20				
7	Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	Orang			2	2				
8	Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	Orang			3	3				
9	Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	Orang			5	5				
10	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang			2	2				
2)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah		1065	1065			1.760.300.144,00		DAU, DAK, CSR, LAINNYA	DINAS KESEHATAN
1	Alat Pertindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	Unit			1598	1598				
2	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	Unit			488310	99000				
3	Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	Unit			1065	1065				
4	Tempat sampah biologis	Unit			10	10				
5	Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	.			1065	1065				
6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit			1065	1065				

7	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit			10	10			
8	Dokter	Orang			2044	2044			
9	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang			155	155			
10	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang			323	323			
11	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang			16	16			
12	Tenaga Laboratorium	Orang			1106	1106			
13	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang			301	301			
14	Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang			26	26			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28
	Provinsi									
1)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah		105	105			865.596.000,00		DAU, DAK, CSR, LAINNYA	DINAS KESEHATAN
1	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Orang			105	105				
2	Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)	Orang			105	105				
3	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	Orang			105	105				
4	Dokter	Orang			10	10				
5	Perawat	Orang			12	12				
6	Bidan	Orang			20	20				
7	Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	Orang			2	2				
8	Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	Orang			3	3				
9	Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	Orang			5	5				
10	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang			2	2				
2)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah		1065	1065			2.112.360.172,80		DAU, DAK, CSR, LAINNYA	DINAS KESEHATAN
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	Unit			1598	1598				
2	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	Unit			488310	99000				
3	Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	Unit			1065	1065				
4	Tempat sampah biologis	Unit			10	10				
5	Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	.			1065	1065				
6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit			1065	1065				
7	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit			10	10				
8	Dokter	Orang			2044	2044				

9	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang				155	155				
10	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang				323	323				
11	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang				16	16				
12	Tenaga Laboratorium	Orang				1106	1106				
13	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang				301	301				
14	Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang				26	26				

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	29	30	31	32	33	34	35	36
	Provinsi									
1)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah		105	105			865.596.000,00		DAU, DAK, CSR, LAINNYA	DINAS KESEHATAN
1	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Orang			105	105				
2	Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)	Orang			105	105				
3	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	Orang			105	105				
4	Dokter	Orang			10	10				
5	Perawat	Orang			12	12				
6	Bidan	Orang			20	20				
7	Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	Orang			2	2				
8	Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	Orang			3	3				
9	Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	Orang			5	5				
10	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang			2	2				
2)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah		1065	1065			2.112.360.172,80		DAU, DAK, CSR, LAINNYA	DINAS KESEHATAN
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	Unit			1598	1598				
2	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	Unit			488310	99000				
3	Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	Unit			1065	1065				
4	Tempat sampah biologis	Unit			10	10				
5	Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperluka	-			1065	1065				
6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit			1065	1065				
7	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit			10	10				
8	Dokter	Orang			2044	2044				

9	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang			155	155				
10	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang			323	323				
11	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang			16	16				
12	Tenaga Laboratorium	Orang			1106	1106				
13	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang			301	301				
14	Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang			26	26				

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	37	38	39	40	41	42	43	44
	Provinsi									
1)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah		105	105			865.596.000,00		DAU, DAK, CSR, LAINNYA	DINAS KESEHATAN
1	Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Orang			105	105				
2	Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)	Orang			105	105				
3	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	Orang			105	105				
4	Dokter	Orang			10	10				
5	Perawat	Orang			12	12				
6	Bidan	Orang			20	20				
7	Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	Orang			2	2				
8	Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	Orang			3	3				
9	Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	Orang			5	5				
10	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang			2	2				
2)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah		1065	1065			2.112.360.172,80		DAU, DAK, CSR, LAINNYA	DINAS KESEHATAN
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit	Unit			1598	1598				
2	Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin	Unit			488310	99000				
3	Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	Unit			1065	1065				
4	Tempat sampah biologis	Unit			10	10				
5	Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	*			1065	1065				
6	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit			1065	1065				
7	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit			10	10				

8	Dokter	Orang				2044	2044				
9	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang				155	155				
10	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang				323	323				
11	Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang				16	16				
12	Tenaga Laboratorium	Orang				1106	1106				
13	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang				301	301				
14	Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang				26	26				

Tabel 3.3 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Kalimantan Timur 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Provinsi										
1)	Penyediaan kebutuhan pokok Air Minum Regional lintas kabupaten/kota										
	Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota		2022	100	100	0	0	0		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINAS PUPR PERA KALTIM
1	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kuantitas Air (demand pemenuhan kapasitas)	Liter/Detik				0	0	0			
2	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Liter/Detik				0	0	0			
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota		2022	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	100%	1.926.948.000,00			
	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota	2022	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	100%	1.926.948.000,00			
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota										
	Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota		2022	100	100	0	0	0		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINAS PUPR PERA KALTIM
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga				0	0	0			

2.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga				0	0	0			
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga				0	0	0			
Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota			2022	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	100%	2.289.170.500,00			
Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)			2022	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	100%	2.289.170.500,00			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20
	Provinsi									
1)	Penyediaan kebutuhan pokok Air Minum Regional lintas kabupaten/kota									
	Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota		100	100	0	0	0		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINAS PUPR PERA KALTIM
1	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kuantitas Air (demand pemenuhan kapasitas)	Liter/Detik			0	0	0			
2	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak beresak, tidak berbusa, tidak berbau)	Liter/Detik			0	0	0			
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota		10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	0%	5.070.565.000,00			
	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	0%	5.070.565.000,00			
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota									
	Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota		100	100	0	0	0		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINAS PUPR PERA KALTIM
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga			0	0	0			

2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga			0	0	0			
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga			0	0	0			
Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	0%	2.624.988.400,00			
Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)		Jumlah kab/kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	0%	2.624.988.400,00			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28
	Provinsi									
1)	Penyediaan kebutuhan pokok Air Minum Regional lintas kabupaten/kota									
	Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota		100	100	0	0	0		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINAS PUPR PERA KALTIM
1	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kuantitas Air (demand pemenuhan kapasitas)	Liter/Detik			0	0	0			
2	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau)	Liter/Detik			0	0	0			
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota		10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	0%	2.150.000.000,00			
	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	0%	2.150.000.000,00			
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota									
	Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota		100	100	0	0	0		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINAS PUPR PERA KALTIM
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga			0	0	0			

2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga			0	0	0			
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga			0	0	0			
Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota			10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	0%	3.350.000.000,00			
Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)			Jumlah kab/kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	0%	3.350.000.000,00		

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	29	30	31	32	33	34	35	36
	Provinsi									
1)	Penyediaan kebutuhan pokok Air Minum Regional lintas kabupaten/kota									
	Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota		16000 SR	0	100%	0	320.000.000.000,00		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINAS PUPR PERA KALTIM
1	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kuantitas Air (demand pemenuhan kapasitas)	Liter/Detik	16000 SR	0	100%	0	320.000.000.000,00			
2	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	Liter/Detik	16000 SR	0	100%	0	320.000.000.000,00			
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota		10 Kab/Kota	0	100%	0%	3.400.000.000,00			
	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota	10 Kab/Kota	0	100%	0%	3.400.000.000,00			
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota									
	Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota		100	100	0	0	0		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINAS PUPR PERA KALTIM
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga			0	0	0			

2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga			0	0	0			
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga			0	0	0			
Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota			10 Kab/Kota	0	100%	0%	8.732.011.690,00			
Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)			Jumlah kab/kota	10 Kab/Kota	0	100%	0%	8.732.011.690,00		

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	37	38	39	40	41	42	43	44
	Provinsi									
1)	Penyediaan kebutuhan pokok Air Minum Regional lintas kabupaten/kota									
	Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota		38000 SR	0	100%	0	1.050.000.000.000,00		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINAS PUPR PERA KALTIM
1	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kuantitas Air (demand pemenuhan kapasitas)	Liter/Detik	38000 SR	0	100%	0	1.050.000.000.000,00			
2	Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa)	Liter/Detik	38000 SR	0	100%	0	1.050.000.000.000,00			
	Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota									
	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota								
2)	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota									
	Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota				0	0	0		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINAS PUPR PERA KALTIM
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga			0	0	0			

2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tongga			0	0	0			
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tongga			0	0	0			
	Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota		10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	1	0	0			
	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional/SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah kab/kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	1	0	0			

Tabel 3.4 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat Kalimantan Timur 2023-2027

[illegible]

NO	Indikator Layanan SPM	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Berkualitas	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Berkualitas	Anggaran			
1	2	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	Provinsi																
1)	Keberhasilan & Efektivitas Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
2)	Keberhasilan Pemenuhan & Lengkapi Rantai Berantai Berantai																
3)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
4)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
5)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
6)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
7)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
8)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
9)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
10)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
11)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
12)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
13)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
14)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
15)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
16)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
17)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
18)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
19)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
20)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
21)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
22)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
23)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
24)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
25)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
26)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
27)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
28)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
29)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
30)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
31)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
32)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
33)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
34)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
35)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
36)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
37)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
38)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
39)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
40)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
41)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
42)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																
43)	Keberhasilan Rantai yang Lengkap dari Rantai Berantai Berantai																

**Tabel 3.5 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
Provinsi Kalimantan Timur 2023-2027**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi		100 %	1.000	1.000			1.601.532.100	Jenis Layanan : 1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi; 2. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu.	APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	19			928	928	807.108.300	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar (Permendagri 17 tahun 2019)	APBD	SATPOL PP
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	6			19	19		Penegakan Perda sesuai SOP (Permendagri 54 tahun 2011)	APBD	SATPOL PP

c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	63		30	30	752.405.600	Pemenuhan Jumlah minimal Satlinmas yang terlatih dan diukuhkan (Permendagri 71 tahun 2020)	APBD	SATPOL PP
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Transtribum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	0		2	2	42.018.200	Jumlah pelanggaran dan pengaduan transtribum yang ditangani	APBD	SATPOL PP
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	1		1	0	-	Jumlah Pemenuhan pelayanan warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	APBD	SATPOL PP
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat pelanggaran Perda dan Perkada dan dilindaki/juli dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	1		1	0	-	Jumlah Pemenuhan pelayanan warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	APBD	SATPOL PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2024)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi		1.000	-			2.139.909.220	Jenis Layanan : 1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi; 2. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu.	APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit			940	929	1.579.682.850	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar (Permendagri 17 tahun 2019)	APBD	SATPOL PP
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan untuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen			7	7	-	Penegakan Perda sesuai SOP (Permendagri 54 tahun 2011)	APBD	SATPOL PP

c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang		120	-	522.535.300	Pemenuhan Jumlah minimal Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan (Permendagri 71 tahun 2020)	APBD	SATPOL PP
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen		2	2	37.691.070	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	APBD	SATPOL PP
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang		1	0	-	Jumlah Pemenuhan pelayanan warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	APBD	SATPOL PP
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang		1	0	-	Jumlah Pemenuhan pelayanan warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	APBD	SATPOL PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi		1.000	-			665.407.778	Jenis Layanan : 1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi; 2. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu.	APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit			943	929	105.181.408	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Saipras sesuai standar (Permendagri 17 tahun 2019)	APBD	SATPOL PP
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen			7	7	-	Penegakan Perda sesuai SOP (Permendagri 54 tahun 2011)	APBD	SATPOL PP

c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang		150	-	522.535.300	Pemenuhan Jumlah minimal Satlinmas yang tertatih dan dikukuhkan (Permendagri 71 tahun 2020)	APBD	SATPOL PP
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen		2	2	37.691.070	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	APBD	SATPOL PP
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materi (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang		1	0	-	Jumlah Pemenuhan pelayanan warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materi	APBD	SATPOL PP
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang		1	0	-	Jumlah Pemenuhan pelayanan warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	APBD	SATPOL PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi		150	150			665.407.778	Jenis Layanan : 1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi; 2. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu.	APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit			943	929	105.181.408	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar (Permendagri 17 tahun 2019)	APBD	SATPOL PP
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen			7	7	-	Penegakan Perda sesuai SOP (Permendagri 54 tahun 2011)	APBD	SATPOL PP

c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang			200	-	522.535.300	Pemenuhan Jumlah minimal Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan (Pemendagri 71 tahun 2020)	APBD	SATPOL PP
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen			2	2	37.691.070	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	APBD	SATPOL PP
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materi (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang			1	0	-	Jumlah Pemenuhan pelayanan warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materi	APBD	SATPOL PP
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang			1	0	-	Jumlah Pemenuhan pelayanan warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	APBD	SATPOL PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi		1.000	-			665.407.778	Jenis Layanan : 1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi; 2. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu.	APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit			943	929	105.181.408	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar (Permendagri 17 tahun 2019)	APBD	SATPOL PP
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen			7	7		Penegakan Perda sesuai SOP (Permendagri 54 tahun 2011)	APBD	SATPOL PP

c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang		200	-	522.535.300	Pemenuhan Jumlah minimal Satlinmas yang terlatih dan dikuatkan (Permendagri 71 tahun 2020)	APBD	SATPOL PP
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen		2	2	37.691.070	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	APBD	SATPOL PP
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang		1	0	-	Jumlah Pemenuhan pelayanan warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	APBD	SATPOL PP
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang		1	0	-	Jumlah Pemenuhan pelayanan warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	APBD	SATPOL PP

Tabel 3.6 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial Kalimantan Timur 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Provinsi										
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti		2023	21	21			2.301.066.500		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang	2023	21	21	21	21	672.102.500	APBD		DINSOS
2	Penyediaan sandang	Orang	2023	21	21	21	21	152.364.500	APBD		DINSOS
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses **	Unit	2023	1	1	1	1		APBD		DINSOS
4	Penyediaan alat bantu**	Orang	2023	2	2	2	2		APBD		DINSOS
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	2023	3	3	3	3		APBD		DINSOS
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2023	21	21	21	21	870.099.500	APBD		DINSOS
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2023	21	21	21	21		APBD		DINSOS
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK	Orang	2023	2	2	2	2		APBD		DINSOS
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2023	21	21	21	21	606.500.000	APBD		DINSOS
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga** / Bukti keberadaan keluarga	Orang	2023	21	21	21	21		APBD		DINSOS
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	2023	1	1	1	1		APBD		DINSOS
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti		2023	253	253			4.952.538.000	APBD	DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Pengasuhan	Orang	2023	36	36	36	36		APBD		DINSOS
2	Penyediaan permakanan	Orang	2023	253	253	253	253	3.281.870.000	APBD		DINSOS
3	Penyediaan sandang	Orang	2023	253	253	253	253	733.190.000	APBD		DINSOS
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit	2023	7	7	7	7		APBD		DINSOS
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	2023	5	5	5	5	257.144.000	APBD		DINSOS
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2023	253	253	253	253	150.623.000	APBD		DINSOS
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2023	253	253	253	253		APBD		DINSOS

8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak**	Orang	2023	18	18	18	18	368.380.000	APBD		DINSOS
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2023	4	4	4	4	161.331.000	APBD		DINSOS
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang	2023	65	65	65	65		APBD		DINSOS
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	2023	12	12	12	12		APBD		DINSOS
12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	Orang	2023	2	2	2	2		APBD		DINSOS
3)	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di dalam panti		2023	110	110			3.276.221.700	APBD	DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang	2023	110	110	110	110	2.345.395.000	APBD		DINSOS
2	Penyediaan sandang	Orang	2023	110	110	110	110	25.680.000	APBD		DINSOS
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit	2023	17	17	17	17		APBD		DINSOS
4	Penyediaan alat bantu**	Orang	2023	5	5	5	5		APBD		DINSOS
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	Orang	2023	6	6	6	6	85.253.000	APBD		DINSOS
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2023	7	7	7	7	440.691.700	APBD		DINSOS
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2023	4	4	4	4	305.700.000	APBD		DINSOS
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**	Orang	2023	2	2	2	2		APBD		DINSOS
9	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	2023	1	1	1	1		APBD		DINSOS
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang	2023	25	25	25	25		APBD		DINSOS
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	2023	8	8	8	8		APBD		DINSOS
12	Pemulasaraan**	Orang	2023	25	25	25	25	73.502.000	APBD		DINSOS
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		2023	82	82			1.598.497.543	APBD	DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang	2023	50	50	50	50	653.737.500	APBD		DINSOS
2	Penyediaan sandang	Orang	2023	50	50	50	50	106.420.000	APBD		DINSOS
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit	2023	5	5	5	5	23.090.000	APBD		DINSOS
4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	2023	50	50	50	50	672.650.043	APBD		DINSOS
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2023	3	3	3	3	142.600.000	APBD		DINSOS
6	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang	2023	50	50	50	50		APBD		DINSOS
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	2023	50	50	50	50		APBD		DINSOS
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak**	Orang	2023	50	50	50	50		APBD		DINSOS
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2023	3	3	3	3		APBD		DINSOS
10	Pemulangan ke daerah asal**	Orang	2023	40	40	40	40		APBD		DINSOS
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi		2023	1518	1518			1.382.530.125	APBD	DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang	2023	1518	1518	1518	1518	517.016.000	APBD		DINSOS
2	Penyediaan sandang	Orang	2023	1518	1518	1518	1518		APBD		DINSOS
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi**	Unit	2023	300	300	300	300		APBD		DINSOS
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan**	Orang	2023	300	300	300	300	202.040.000	APBD		DINSOS
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	2023	100	100	100	100	663.474.125	APBD		DINSOS

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran	
1	2	3	13	14	15	16	17	18
	Provinsi							
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Pantli		27	27			2301066500	
1	Penyediaan permakanan	Orang			27	27		
2	Penyediaan sandang	Orang			27	27		
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses **	Unit			1	1		
4	Penyediaan alat bantu**	Orang			2	2		
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Pantli	Orang			3	3		
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			27	27		
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			27	27		
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK	Orang			2	2		
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			27	27		
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga** / Bukti keberadaan keluarga	Orang			27	27		
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang			1	1		
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Pantli		137	137			6182655500	
1	Pengasuhan	Orang			36	36		
2	Penyediaan permakanan	Orang			137	137		
3	Penyediaan sandang	Orang			137	137		
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit			7	7		
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Pantli	Orang			5	5		
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			137	137		
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			137	137		

8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak**	Orang			18	18		
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			4	4		
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang			65	65		
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang			12	12		
12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	Orang			2	2		
3)	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanjar di dalam panti		110	110			2983283700	
1	Penyediaan permakanan	Orang			110	110		
2	Penyediaan sandang	Orang			110	110		
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit			17	17		
4	Penyediaan alat bantu**	Orang			5	5		
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	Orang			6	6		
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			7	7		
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			4	4		
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**	Orang			2	2		
9	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang			1	1		
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang			25	25		
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang			8	8		
12	Pemulasaraan**	Orang			25	25		
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		50	50			1000000000	
1	Penyediaan permakanan	Orang			50	50		
2	Penyediaan sandang	Orang			50	50		
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit			5	5		
4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang			50	50		
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			3	3		
6	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang			50	50		
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang			50	50		
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak**	Orang			50	50		
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			3	3		
10	Pemulangan ke daerah asal**	Orang			40	40		
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi		1518	1518			1382530125	
1	Penyediaan permakanan	Orang			1518	1518		
2	Penyediaan sandang	Orang			1518	1518		
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi**	Unit			300	300		
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan**	Orang			300	300		
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang			100	100		

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencepalan SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28
	Provinsi									
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti		27	27			2301066500		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang			27	27				
2	Penyediaan sandang	Orang			27	27				
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses **	Unit			1	1				
4	Penyediaan alat bantu**	Orang			2	2				
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang			3	3				
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			27	27				
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			27	27				
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK	Orang			2	2				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			27	27				
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga** / Bukti keberadaan keluarga	Orang			27	27				
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang			1	1				
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti		137	137			6182655500		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Pengasuhan	Orang			36	36				
2	Penyediaan permakanan	Orang			137	137				
3	Penyediaan sandang	Orang			137	137				
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit			7	7				
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang			5	5				
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			137	137				
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			137	137				

8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak**	Orang			18	18			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			4	4			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang			65	65			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang			12	12			
12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	Orang			2	2			
3)	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di dalam panti		110	110			2963283700	DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang			110	110			
2	Penyediaan sandang	Orang			110	110			
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit			17	17			
4	Penyediaan alat bantu**	Orang			5	5			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	Orang			6	6			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			7	7			
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			4	4			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**	Orang			2	2			
9	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang			1	1			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang			25	25			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang			8	8			
12	Pemulasaran**	Orang			25	25			
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		50	50			1000000000	DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang			50	50			
2	Penyediaan sandang	Orang			50	50			
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit			5	5			
4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang			50	50			
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			3	3			
6	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang			50	50			
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang			50	50			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak**	Orang			50	50			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			3	3			
10	Pemulangan ke daerah asal**	Orang			40	40			
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi		1518	1518			1382530125	DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang			1518	1518			
2	Penyediaan sandang	Orang			1518	1518			
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi**	Unit			300	300			
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan**	Orang			300	300			
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang			100	100			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	29	30	31	32	33	34	35	36
	Provinsi									
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti		27	27			2301066500		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang			27	27				
2	Penyediaan sandang	Orang			27	27				
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses **	Unit			1	1				
4	Penyediaan alat bantu**	Orang			2	2				
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang			3	3				
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			27	27				
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			27	27				
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK	Orang			2	2				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			27	27				
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga** / Bukti keberadaan keluarga	Orang			27	27				
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang			1	1				
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti		137	137			6182655500		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Pengasuhan	Orang			36	36				
2	Penyediaan permakanan	Orang			137	137				
3	Penyediaan sandang	Orang			137	137				
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit			7	7				
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang			5	5				
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			137	137				
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			137	137				

8	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak**	Orang			18	18				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			4	4				
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang			65	65				
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang			12	12				
12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	Orang			2	2				
3)	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di dalam panti		110	110			2983283700		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang			110	110				
2	Penyediaan sandang	Orang			110	110				
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit			17	17				
4	Penyediaan alat bantu**	Orang			5	5				
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	Orang			6	6				
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			7	7				
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			4	4				
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**	Orang			2	2				
9	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang			1	1				
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang			25	25				
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang			8	8				
12	Pemulasaraan**	Orang			25	25				
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		50	50			1000000000		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang			50	50				
2	Penyediaan sandang	Orang			50	50				
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit			5	5				
4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang			50	50				
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			3	3				
6	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang			50	50				
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang			50	50				
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak**	Orang			50	50				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			3	3				
10	Pemulangan ke daerah asal**	Orang			40	40				
5)	Pertindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggapi Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi		1518	1518			1382530125		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang			1518	1518				
2	Penyediaan sandang	Orang			1518	1518				
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi**	Unit			300	300				
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan**	Orang			300	300				
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang			100	100				

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	37	38	39	40	41	42	43	44
	Provinsi									
1)	Rahabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Pantli		27	27			2301066500		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang			27	27				
2	Penyediaan sandang	Orang			27	27				
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses **	Unit			1	1				
4	Penyediaan alat bantu**	Orang			2	2				
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Pantli	Orang			3	3				
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			27	27				
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			27	27				
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK	Orang			2	2				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			27	27				
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga** / Bukti keberadaan keluarga	Orang			27	27				
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang			1	1				
2)	Rahabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Pantli		137	137			6182655500		DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Pengasuhan	Orang			36	36				
2	Penyediaan permakanan	Orang			137	137				
3	Penyediaan sandang	Orang			137	137				
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit			7	7				
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Pantli	Orang			5	5				
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			137	137				
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			137	137				

6	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak**	Orang			18	18			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			4	4			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang			65	65			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang			12	12			
12	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	Orang			2	2			
3)	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti		110	110			2983283700	DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang			110	110			
2	Penyediaan sandang	Orang			110	110			
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit			17	17			
4	Penyediaan alat bantu**	Orang			5	5			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	Orang			6	6			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			7	7			
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang			4	4			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**	Orang			2	2			
9	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang			1	1			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang			25	25			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang			8	8			
12	Pemulasaraan**	Orang			25	25			
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		50	50			1000000000	DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang			50	50			
2	Penyediaan sandang	Orang			50	50			
3	Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit			5	5			
4	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang			50	50			
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			3	3			
6	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang			50	50			
7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang			50	50			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak**	Orang			50	50			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang			3	3			
10	Pemulangan ke daerah asal**	Orang			40	40			
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi		1518	1518			1382530125	DAU, DAK, DBH, CSR, DANA LAINNYA	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	Orang			1518	1518			
2	Penyediaan sandang	Orang			1518	1518			
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi**	Unit			300	300			
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan**	Orang			300	300			
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang			100	100			

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah

- kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain pemantauan dilakukan setiap 3 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap semester.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. *Ketaatan/compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Pemeriksaan/auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. *Laporan/accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Provinsi KALIMANTAN TIMUR, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?

6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. **Koordinasi**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 5. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. **Manajemen Kerja**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?

3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
1. Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 2. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layananannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
 6. Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
 7. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
 8. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
 3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 2. Bagaimana SPM diposisikan?

3. Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 4. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 5. Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Capaian pada tiap bidang SPM di Provinsi Kalimantan Timur masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Provinsi Kalimantan Timur secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh biro pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

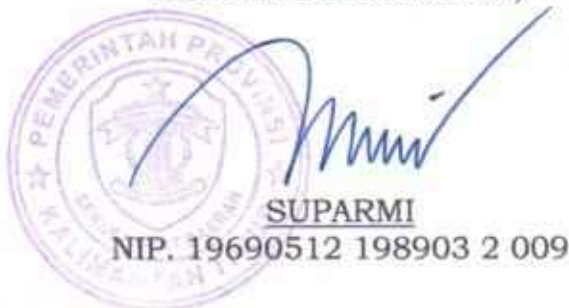
Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kalimantan Timur.

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009